Penerapan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Pada Perusahaan Kontruksi (Studi Kasus Pada CV Wahid Jaya Abadi di Asembagus Situbondo)

[1]| Bambang Eka Dwi Cahyono, [2]| MOH Halim, [3]| Rendy Mirwan Aspirandi

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jember,
Jawa Timur, Indonesia

e-mail: [1]| ekabams5@gmail.com, [2]|halim@unmuhjember.ac.id

Abstrak

CV Wahid Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan jalan, drainase, jembatan dan lain-lain. Perusahaan konstruksi seperti CV Wahid Jaya Abadi mempunyai perlakuan akuntansi yang tidak sama pada perusahaan lainnya dikarenakan aktivitas serta sifat yang dilaksanakan dalam kontrak konstruksi, tanggal ketika aktivitas kontrak konstruksi mulai dilaksanakan serta tanggal ketika aktivitas selesai umumnya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan (PSAK No. 34). Skripsi ini bertujuan untuk meniliti apakah metode pengakuan pendapatan yang dipergunakan CV Wahid Jaya Abadi ini senada pada PSAK No.34 ataukah tidak. Jenis data yang digunakan berupa data primer serta sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan yakni interview, observasi, dan wawancara serta analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, diketahui bahwa proyek yang dikerjakan CV Wahid Jaya Abadi ada yang pengerjaannya kurang dari satu periode akuntansi (jangka pendek) dan ada juga yang lebih dari satu tahun periode akuntansi (jangka panjang). Proyek yang menjadi studi kasus dalam skripsi ini adalah proyek yang pengerjaannya satu tahun periode akuntansi yakni dari bulan Maret 2018 sampai dengan Februari 2019 dengan kontrak senilai Rp 860.000.000-. Metode pengakuan pendapatan yang dipergunakan yakni metode kontrak selesai dan penyajian pengakuan pendapatan menggunakan *cash basis*. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan CV Wahid Jaya Abadi masih belum sesuai pada PSAK No. 34 dikarenakan perusahaan ini masih belum mempergunakan metode presentase untuk proyek jangka panjang.

Kata kunci: PSAK No, 34, Kontrak Selesai, Cash Basis

Abstract

CV Wahid Jaya Abadi is a company engaged in construction such as infrastructure development, road procurement, drainage, bridges and others. Construction companies such as CV Wahid Jaya Abadi have accounting treatment that is not the same as other companies due to the activities and nature carried out in the construction contract, the date when the construction contract activity begins and the date when the activity is completed generally fall in different accounting periods (PSAK No. 34). This thesis aims to examine whether the revenue recognition method used by CV Wahid Jaya Abadi is in line with PSAK No. 34 or not. The type of data used in the form of primary and secondary data. The data collection technique used is interview, observation, and interview and the data analysis used is descriptive analysis. Based on the research results obtained, it is known that some of the projects carried out by CV Wahid Jaya Abadi have less than one accounting period (short term) and some have more than one year of accounting period (long term). The project that is the case study in this thesis is a project that has a one-year accounting period, from March 2018 to February 2019 with a contract worth IDR 860,000,000. The revenue recognition method used is the completed contract method and the presentation of revenue recognition using a cash basis. The revenue recognition method used by CV Wahid Jaya Abadi is still not in accordance with PSAK No. 34 because this company still does not use the percentage method for long-term projects.

Keywords: *PSAK No, 34, Completed Contract, Cash Basis compliance.*

PENDAHULUAN

Permasalahan utama pada setiap badan usaha dalam transaksi keuangan adalah menyangkut pengakuan pendapatan dan biaya secara umum. Pengakuan tersebut yakni ketika sebuah transaksi perlu diakui selaku pendapatan atau biaya, apakah pendapatannya itu diakui bagi periode saat ini ataukah periode mendatang. Kerap atasan perusahaan berhadapan dengan permasalahan penentuan keputusan dimana dengan langsung ataupun tidak mampu berpengaruh pada harga pokok penjualan ataupun pendapatan. Kondisi tersebut memaksa manajemen memberikan laporan yang tepat terkait laporan kinerja keuangan khususnya permasalahan neraca secara periodik serta laporan laba/ rugi perusahaan. Hal yang bisa terjadi jika tidak dilaksanakannya pendataan akuntansi perusahaan dengan sesuai serta konsisten selaras pada kaidah akuntansi yang ada meliputi:

Laporan keuangan perusahaan tidak bisa mencerminkan kondisi sebenarnya.
Pengambilan keputusan yang manajemen lakukan tidaklah akurat dikarenakan terdapatnya laporan yang tidak selaras pada fakta dalam lapangan.

Penetapan mekanisme pencatatan akuntansi serta sistem kerja menjadi kurang jelas serta relatif menganut kemauannya top manajer untuk menetapkan kebijaksanaannya perusahaan tanpa melihat kaidah akuntansi umumnya.

Laporan keuangan bukan hanya mempunyai manfaat untuk pihak internal perusahaan namun untuk pihak eksternal juga yang meliputi:
Para investor, banker, ataupun kreditur lain yang mempunyai kepentingan ataupun membutuhkan laporan, dimana jika laporan keuangan tersebut tidak dengan benar disusun maka keakuratannya akan hilang serta relatif menyesatkan.

Para banker serta kreditur sebelum memutuskan menolak ataupun memberi permintaan kredit perusahaan, harus memahami lebih dulu kondisi keuangannya perusahaan. Sehingga prosedur pencatatan akuntansi secara benar merupakan sebuah hal wajib pada proses menyusun laporan keuangan.

Perusahaan konstruksi sendiri mempunyai perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang tidak sama pada perusahaan lain dikarenakan aktivitas serta sifat yang dilaksanakan dalam kontrak konstruksi, tanggal ketika kontrak konstruksi mulai dilaksanakan serta diselesaikan normalnya jatuh dalam periode akuntansi yang berlainan (PSAK No. 34). Persoalan pokok secara umum pada akuntansi untuk pendapatan dan biaya yakni berkaitan pada pengukuran serta pengakuan pendapatan dan biaya tersebut. Pengakuan pendapatan dan biaya yakni ketika sebuah transaksi perlu diakui selaku pendapatan ataupun biaya, apakah diakui dalam periode saat ini ataukah periode mendatang.

Perusahaan dalam sektor jasa konstruksi (kontraktor) terkait penyelesaian sebuah proyek ataupun pekerjaan, mempunyai rentang waktu penyelesaian yang beragam dari yang satu tahun kurang hingga yang melebihi setahun (multi years project). Pendapatan secara umum akan diakui selepas pekerjaan dituntaskan. Tetapi dalam standard akuntansi keuangan, perusahaan ini diperbolehkan dalam mengakui pendapatan semasa produksi berlangsung sejalan pada tahapan kemajuan serta penyelesaiannya kontrak.

Pengakuan pendapatan jasa konstruks menganalisis pendapatan perusahaan melalui patokan PSAK No. 34. Studi kasus pada CV. Indarchi Architect Team Klaten Konstruksi Palembang, hasilnya menjelaskan perusahaan terkait mengakui pendapatan miliknya tidak selaras pada PSAK No. 34 dikarenakan metode persentase penyelesaiannya belum dilaksanakan pada proyek berjangka panjang (Pramurti, 2016). Hasil penelitian Tipukadang dkk (2016) juga mengungkapkan bahwa pengaruhnya pengakuan pendapatan akuntansi kontrak konstruksi berdasar PSAK No. 34 terhadap laporan laba rugi periodik dengan hasil penelitian pada CV. Noved Karya, CV. Budi Putra serta PT. Duta Konstruksi Reality, tiga-tiganya belum secara penuh mengaplikasikan PSAK No. 34 dikarenakan pencatatan transaksinya tiga perusahaan itu dilaksanakan ketika kontrak ditandatangani.

CV. Wahid Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan jalan, drainase, jembatan dan lain-lain. Dalam segi keuangan, CV. Wahid Jaya Abadi masih menggunakan sistem tradisional dan masih sangat manual dalam penyusunan laporan keuangannya. CV. Wahid Jaya Abadi belum mengenal standart akuntansi keuangan yang telah diatur dalam PSAK khususnya PSAK 34 yang mengatur tentang bagaimana pengakuan pendapatan dan biaya pada perusahaan konstruksi.

Sangat pentingnya laporan keuangan, maka hendaknya pimpinan maupun pihak manajemen perusahaan CV. Wahid Jaya Abadi di Situbondo bisa melaksanakan pengawasan serta kebijakan secara baik. Untuk terciptanya sebuah

pengawasan secara baik dibutuhkan alat kontrol efektif guna pengelolaan berjalannya kegiatan perusahaan sejalan pada apa yang direncanakan. Misalnya yakni melalui menyajikan dan mengungkapkan pendapatan dan biaya perusahaan yang sejalan pada kaidah akuntansi ataupun sejalan pada PSAK (Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan).

Berpatokan pada uraian yang sudah dijabarkan, masih tidak ditemui terdapatnya konsistensi dalam implementasi PSAK No.34 pada pengakuan pendapatan dan biaya perusahaan jasa konstruksi, kondisi tersebut menjadi daya tarik untuk peneliti dalam meneliti kembali terhadap CV. Wahid Jaya Abadi di Asembagus, Situbondo yang peneliti jadikan pilihan selaku objek untuk diteliti. Peneliti menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **" Penerapan Pengakuan Pendapatan dan Biaya pada Perusahaan Konstruksi " (Studi Kasus pada CV. Wahid Jaya Abadi di Asembagus, Situbondo)**

LANDASAN TEORI

Pengertian Pendapatan

Untuk memahami secara lebih dalam terkait pengertiannya pendapatan, diperlukan pemahaman terkait konsep pendapatan lebih dulu. Dasarnya terdapat dua pendekatan pada konsep pendapatan yang bisa ditemui pada literatur akuntansi.

Pendekatan yang berpusat terhadap inflow (arus masuk) aktiva yang diakibatkan dari aktivitas operasionalnya perusahaan, dimana pendapatan diakui ketika penjualan terjadi ataupun ketika itu juga, yakni ketika terjadi arus masuknya aktiva baru selaku akibatnya hasil akhir aktivitas operasional serta besar pendapatan tersebut bisa diukur berdasar pada nilai aktiva masuk itu.

Pendekatan yang berpusat terhadap penciptaan jasa maupun barang beserta penyaluran pada konsumen ataupun produsen lain, contohnya pada perusahaan jasa konstruksi dimana pada pengerjaan kontrak berjangka panjang mempergunakan persentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan mereka, artinya pendapatan akan diakui sejalan pada besar jasa yang sudah dilaksanakan ataupun pekerjaan yang sudah dituntaskan serta perlu diakui ketika itu juga.

Pengakuan Pendapatan

Aktivitas operasi perusahaan yakni proses menerus dimana dimulai dengan proses membeli bahan dasar, mengolah bahan dasar dimana prosesnya mempergunakan peralatan mesin serta tenaga kerja, menjual produk, menagih, serta menerima uang penjualan. Seluruh aktivitas itu termasuk langkah dalam mendapatkan pendapatan.

FASB (Financial Accounting Standart Board) memberi dua kriteria pengakuan pendapatan seperti yang disadur (Smith & Skousen, 2006) Suwardjono (2006). Pendapatan diakui apabila jumlah rupiah pendapatannya sudah direalisasikan ataupun terbilang cukup pasti hendak terealisasi. Pendapatan dinyatakan direalisasikan jika sudah berlangsung transaksi pertukaran jasa ataupun produk hasil aktivitas perusahaan pada klaim ataupun kas guna memperoleh kas. Pendapatan bisa dinyatakan cukup pasti hendak terealisasi jika barang penukar yang diperoleh bisa secara mudah dikonversi ke beberapa kas ataupun setara kas yang terbilang pasti. Supaya bisa memenuhi syarat mudah dikonversi barang penukar (aktiva) yang pasti tidak terpengaruh dari ukuran serta bentuk barang juga bisa dijual belikan dengan mudah tanpa membutuhkan biaya yang berarti.

Pendapatan diakui jika telah terhimpun terbentuk. Guna mendapatkan pendapatan, perusahaan perlu melaksanakan aktivitas menghasilkan jasa ataupun barang selaku sumber pokok dari pendapatan. Pendapatan bisa dinyatakan sudah terhimpun jika aktivitas dalam memperoleh pendapatan itu sudah berlangsung serta dengan substansial sudah selesai dimana membuat sebuah unit usaha mempuyai hak untuk menguasai manfaat pada pendapatan. Sementara dalam Standar Akuntansi Keuangan (2010, PSAK No : 23, paragraf 19) dijelaskan "bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasikan dengan andal, pendapatan yang sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca." Hasil sebuah transaksi bisa secara andal diestimasikan jika semua kondisi berikut terpenuhi:

1) Jumlah pendapatan bisa secara andal diukur.
2) Besar peluang manfaat ekonomi berkaitan pada transaksi tersebut akan perusahaan peroleh.
3) Tingkatan penyelesaian sebuah transaksi dalam tanggal neraca bisa secara andal diukur andal.
4) Biaya yang timbul pada transaksi itu serta biaya guna menyelesaikan transaksi itu bisa secara andal diukur.

Pengertian Biaya

Sama halnya pada pendapatan, istilah biaya ataupun beban juga termasuk konsep arus yang mencerminkan perubahan yang tidak menguntungkan pada sumber dayanya perusahaan. Namun tak semua perubahan tersebut termasuk biaya ataupun beban. Definisi

dari biaya sendiri yang disampaikan sejumlah ahli meliputi:

Mulyadi (2010:8) adalah "pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu."

Bastian dan Nurlela (2010:7) "Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukan dalam neraca."

Carter & Usry yang dialih bahasakan oleh Krista (2009:29) "Biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Pengeluaran atau pengorbanan pada saat diakuisisi diwakili oleh penyusutan saat ini atau dimasa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain."

Pengakuan Biaya

Biaya berlangsung jika jasa ataupun barang digunakan maupun dikonsumsi pada proses mendapatkan pendapatan. Pelaporan biaya bisa berlangsung bersama pada aktivitas mempergunakan jasa maupun barang; ataupun boleh dilaksanakan selepas aktivitas tersebut; ataupun pada kondisi yang tidak biasa, boleh mendahului aktivitas tersebut. Ketika biaya perlu dilaporkan, sebagian ditentukan dari pendekatan laba yang dianjurkan dengan tersirat maupun tegas. Pengertian laba selaku perubahan pada nilai umumnya menyarankan bahwasanya biaya perlu dilaporkan setiap terjadi penurunannya ataupun bila tidak ada nilai nyata ataupun manfaat yang di masa mendatang yang bisa diterima dari pengguna jasa maupun barang. Konsep laba dimana menekankan arus kas menjelaskan bahwasanya biaya perlu untuk dilaporkan sedekat yang dimungkinkan pada saat pengeluaran kas yang sebenarnya. Akuntansi akrual yang tradisional agaknya ada antara dua estrem ini namun bersandar terhadap konsep nilai yang menyarankan bahwasanya harga masukan (biaya) perlu ditahan hingga pertambahan nilai dilaporkan dengan pengganti, yakni harga penjualan ataupun ke luar. Bisa dikatakan, biaya haruslah diakui dalam periode dimana pendapatan terkait diakui (Warren, Reeve, & Frees, 2006)

Pengukuran Biaya

Tujuannya pengukuran biaya yakni guna mengetahui berapakah jumlah yang dibebankan dalam periode berjalan serta menunda ke periode mendatang, jumlah yang mencerminkan perubahannya jasa maupun barang yang hendak dipergunakan pada periode mendatang itu. Pengukuran biaya yang kerap dipergunakan yakni meliputi (Warren, Carl S, 2006 : 180):

Akuntansi Untuk Perusahaan Kontruksi

Berdasar pada Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yakni PSAK 34: Kontrak Konstruksi Paragraf 02 adalah "suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan." Paragraf 26 dalam metode persentase penyelesaian, "pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi pada periode akuntansi dimana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasa diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi dimana pekerjaan yang berhubungan dilakukan." Paragraf 30 tahap penyelesaian "suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan."

Metode Pengakuan Pendapatan Kontrak

Metode kontrak selesai biaya-biaya dari kontrak yang dikerjakan diakumulasikan, dan tidak ada pembebanan yang dilakukan atas rekening pendapatan, biaya dan laba kotor sampai dengan kontrak selesai dikerjakan. Metode kontrak selesai tidak melakukan pencatatan sebelum penyelesaian kontrak, sehingga untuk kerugian-kerugian yang sudah dapat diduga harus dilakukan penyisihan. Selain itu, dalam metode kontrak selesai terdapat pendapatan yang tidak dilaporkan sampai tahun penyelesaiannya sehingga menimbulkan penyimpangan dalam pencatatan laba. Metode kontrak selesai memiliki keunggulan dan kelemahan, seperti yang diungkapkan menurut Kieso (2011) bahwa "Keunggulan utama metode kontrak selesai adalah pendapatan yang dilaporkan didasarkan atas hasil akhir dan bukan atas estimasi pekerjaan yang belum dilaksanakan. Sedangkan kelemahan utamanya adalah bahwa metode ini tidak mencerminkan kinerja masa berjalan apabila periode kontrak mencakup lebih dari satu periode akuntansi." Menurut Nariswari dkk (2016) ayat jurnal untuk periode kontrak akan dibuat di pembukuan kontrak, baik dalam metode persentase penyelesaian maupun metode kontrak selesai.

Metode Pengakuan Biaya Kontrak

SAK tahun 2007 pernyataan no. 34, biaya suatu kontrak konstruksi terdiri dari :
Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu.
Biaya yang dapat diartibusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat di alokasikan ke kontrak tersebut
Biaya lain yang secara khusus dapat ditagih ke pemberi kerja sesuai isi kontrak.
Biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi, tetapi tidak terbatas pada :
Biaya pekerja lapangan, termasuk penyedia.
Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak.
Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak.
Biaya penyewaan sarana dan peralatan.
Biaya rancangan dan bantuan tekhnis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak.
Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan.
Klaim dari pihak ketiga.

Pengakuan Pendapatan dan Biaya Kontrak Kontruksi Menurut PSAK No. 34

Berikut ini "uraian yang berhubungan dengan Pendapatan Konstruksi menurut PSAK no. 34 adalah sebagai berikut:
Kontrak kontruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi satu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok.
Kontrak Harga Tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan, atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya.
Suatu klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
Klaim dapat timbul, umpanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
Retensi adalah jumlah termin (progress billings) yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki.
Termin (progress billings) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja."

Landasan Penelitian Terdahulu

Septiono dkk (2015), meneliti tentang metode pengakuan pendapatan yang diterapkan di perusahaan yang sudah tepat atau belum dan bagaimana pengaruhnya terhadap penyusuna laporan keuangan, Yang melakukan penelitian pada PT. Petrosida Gresik. Untuk menganalisis data yang di peroleh dari hasil penelitian digunakan tahapan antara lain :
Metode pengakuan pendapatan yang ada di perusahaan dengan teorinya, menganalisa laporan keuangan menurut yang disajikan perusahaan dan yang dibuat peneliti, melihat pengaruh dari metode pengakuan pendapatan yang berbeda tersebut terhadap penyajian dan laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian Asosiatif Kausal dengan pendekatan kuantitatif. Yang termasuk data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti bukubuku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Yang termasuk data sekunder pada penelitian ini adalah sumber data tidak langsung memberikan sumber data kepada pengumpul data.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan ada tiga yaitu interview, observasi, dan dokumentasi. Pengertian dari beberapa metode tersebut sebagai berikut ini:
Interview, Observasi, Dokumentasi

Metode Analisis Data

Untuk melaksanakan penelitian, penulisan memulai dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur dan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan penelitian dan pembahasan masalah dalam skripsi ini. Kemudian penulis melakukan peninjauan ke perusahaan. Sebagai obyek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan untuk pembahasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis Deskriptif. Penggunakan tekhnik analisis ini untuk menggambarkan kepada perusahaan secara deskriptif. Hasil analisis deskriptif ini berguna

untuk mendukung interprestasi terdapat hasil analisis yang digunakan. Dalam metode analisa deskriptif ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Menentukan proyek konstruksi yang akan dianalisis meliputi : Nilai proyek, waktu proyek dan biaya untuk menyelesaikan proyek.
Mengungkapkan metode pengakuan pendapatan dan biaya yang digunakan atas proyek yang ditangani pada tahun 2018.
Mengevaluasi metode pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan PSAK No. 34.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan kontruksi CV. Wahid Jaya Abadi, proyek yang dikerjakan perusahaan ini ada yang selesai dalam satu periode akuntansi dan ada juga yang pengerjaannya lebih dari satu tahun periode akuntansi. Berikut akan disajikan salah satu proyek yang telah dijalankan oleh CV. Wahid Jaya Abadi bekerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara XI yang berlokasi di PG. Asembagoes Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp 860.000.000,- dengan jangka waktu penyelesaian 1 tahun.
CV. Wahid Jaya Abadi mengukur pendapatannya dengan nilai wajar yaitu nilai yang ada dalam kontrak perjanjian sebesar Rp 860.000.000,- terhitung mulai dari awal proyek pada tanggal 03 Maret 2018 sampai 20 Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Pengakuan Pendapatan CV. Wahid Jaya Abadi

Bulan	Pendapatan (Rp)	Progres
Maret'18	120.000.000	15%
April'18	54.000.000	5%
Mei'18	71.000.000	8%
Juni'18	50.000.000	10%
Juli'18	40.000.000	5%
Agustus'18	105.000.000	5%
September'18	0	2%
Oktober'18	0	0%
November'18	30.000.000	0%
Desember'18	98.000.000	5%
Januari'19	135.000.000	30%
Februari'19	157.000.000	15%
TOTAL	**860.000.000**	**100%**

Sumber: Data Keuangan CV. Wahid Jaya Abadi

CV. Wahid Jaya Abadi menggunakan metode kontrak selesai sebagai metode pengakuan pendapatan meskipun kontrak yang dikerjakan termasuk dalam kontrak jangka panjang. Hal ini dikarenakan CV. Wahid Jaya Abadi masih melakukan laporan keuangan maupun keuntungan saat masa proyeksi telah selesai (Ratunuman, 2013). Perusahaan ini juga menjelaskan bahwa penyajian pendapatan yang digunakan termasuk dalam *cash basis* yaitu pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan saat kas sudah diterima atau dikeluarkan (Yusuf & Nurhayati, 2017).

PSAK No.34 paragraf 10 menyatakan, pendapatan yang diperoleh diukur pada nilai wajar yang diterima, dan paragraph 20 menyatakan bahwa pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak kontruksi harus diakui masing-masing sebagai beban dan pendapatan dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca.

Berdasarkan penjelasan di atas, metode pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh CV. Wahid Jaya Abadi masih tidak sesuai dengan kaidah akuntansi PSAK No.34. Hal ini dikarenakan CV. Wahid Jaya Abadi masih melakukan pencatatan keuangan menggunakan metode kontrak selesai dan penyajian data keuangan juga masih menggunakan *cash basis*, dimana jika dilihat dari lama pengerjaan proyek yakni selama satu tahun maka sebenarnya metode yang baik digunakan berdasarkan kaidah akuntansi PSAK No.34 adalah metode persentase bukan metode kontrak selesai. Selain itu, penyajian pendapatan yang hanya dilakukan saat kas sudah diterima atau dikeluarkan sangat kurang cocok digunakan oleh perusahaan ini sehingga apabila disesuaikan dengan kaidah akuntansi PSAK No.34 perusahaan ini lebih baik menggunakan bentuk penyajian keuangan *accrual basis* daripada *cash basis*. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dilakukan pada CV Wahid Jaya Abadi dapat dikatakan tidak sesuai dengan PSAK No. 34 dikarenakan metode presentase masih belum dilakukan untuk proyek jangka panjang.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian Tiogi (2018), dimana dari hasil penelitian tersebut perusahaan yang diteliti juga menganut metode kontrak selesai dan penyajian data berupa *cash* basis dimana metode pengakuan pendapatan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kaidah akuntansi PSAK

No.34 karena selain pencatatan keuangan tidak dicatat secara andal serta selisih pendapatan antara perusahaan dengan PSAK No.34 cukup besar contohnya pada bulan Maret 2017 selisih pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp 16.850.000. Berikut merupakan perbandingan penyajian pengakuan pendapatan menggunakan *accrual basis* apabila disesuaikan dengan kaidah akuntansi PSAK No.34 selama proses kontruksi:

Tabel 4.2. Tagihan Termin Satu Bulan Maret 2018

1. Pada saat tagihan termin satu bulan Maret 2018 Tagihan termin 1(15% x Rp 860.000.000) Rp 129.000.000 Retensi 5% (Rp 6.450.000) Opname bersih Rp 122.550.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 12.900.000 Total tagihan Rp 135.450.000

Tabel 4.3. Jurnal Pengakauan Pendapatan Bulan Maret 2018

Jurnal pengakuan pendapatan bulan Maret 2018 Piutang dagang Rp 135.450.000
Retensi proyek Rp 6.450.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 129.000.000
PPN keluaran Rp 12.900.000

Tabel 4.4. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Satu Bulan Maret 2018

Jurnal penerimaan tagihan termin 1 bulan Maret 2018
Kas Rp 135.450.000
Piutang dagang Rp 135.450.000

Tabel 4.5. Tagihan Termin Dua Bulan April 2018

2. Pada saat tagihan termin dua bulan April 2018 Tagihan termin 2 (5% x Rp 860.000.000) Rp 43.000.000 Retensi 5% (Rp 2.150.000) Opname bersih Rp 40.850.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 4.300.000 Total tagihan Rp 45.150.000

Tabel 4.6. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan April 2018

Jurnal pengakuan pendapatan bulan April 2018 Piutang dagang Rp 45.150.000
Retensi proyek Rp 2.150.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 43.000.000
PPN keluaran Rp 2.150.000

Tabel 4.7. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Dua Bulan April 2018

Jurnal penerimaan tagihan termin 2 bulan April 2018
Kas Rp 45.150.000
Piutang dagang Rp 45.150.000

Tabel 4.8. Tagihan Termin Tiga Bulan Mei 2018

3. Pada saat tagihan termin tiga bulan Mei 2018 Tagihan termin 3 (8% x Rp 860.000.000) Rp 68.800.000 Retensi 5% (Rp 3.440.000) Opname bersih Rp 65.360.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 6.880.000 Total tagihan Rp 72.240.000

Tabel 4.9. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan Mei 2018

Jurnal pengakuan pendapatan bulan Mei 2018
Piutang dagang Rp 68.800.000
Retensi proyek Rp 3.440.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 43.000.000
PPN keluaran Rp 6.880.000

Tabel 4.10. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Tiga Bulan Mei 2018

Jurnal penerimaan tagihan termin 3 bulan Mei 2018
Kas Rp 72.240.000
Piutang dagang Rp 72.240.000

Tabel 4.11. Tagihan Termin Empat Bulan Juni 2018

4. Pada saat tagihan termin empat bulan Juni 2018 Tagihan termin 4 (10% x Rp 860.000.000) Rp 86.000.000 Retensi 5% (Rp 4.300.000) Opname bersih Rp 81.700.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 8.600.000 Total tagihan Rp 90.300.000

Tabel 4.12. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan Juni 2018

Jurnal pengakuan pendapatan bulan Juni 2018
Piutang dagang Rp 90.300.000
Retensi proyek Rp 4.300.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 86.000.000
PPN keluaran Rp 8.600.000

Tabel 4.13. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Empat Bulan Juni 2018

Jurnal penerimaan tagihan termin 4 bulan Juni 2018
Kas Rp 90.300.000
Piutang dagang Rp 90.300.000

Tabel 4.14. Tagihan Termin Lima Bulan Juli 2018

5. Pada saat tagihan termin lima bulan Juli 2018 Tagihan termin 5 (5% x Rp 860.000.000) Rp 43.000.000 Retensi 5% (Rp 2.150.000) Opname bersih Rp 40.850.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 4.300.000 Total tagihan Rp 45.150.000

Tabel 4.15. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan Juli 2018

Jurnal pengakuan pendapatan bulan Juli 2018 Piutang dagang Rp 45.150.000
Retensi proyek Rp 2.150.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 43.000.000
PPN keluaran Rp 2.150.000

Tabel 4.16. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Lima Bulan Juli 2018

Jurnal penerimaan tagihan termin 5 bulan Juli 2018
Kas Rp 45.150.000
Piutang dagang Rp 45.150.000

Tabel 4.17. Tagihan Termin Enam Bulan Agustus 2018

6. Pada saat tagihan termin enam bulan Agustus 2018 Tagihan termin 6 (5% x Rp 860.000.000) Rp 43.000.000 Retensi 5% (Rp 2.150.000) Opname bersih Rp 40.850.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 4.300.000 Total tagihan Rp 45.150.000

Tabel 4.18. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan Agustus 2018

Jurnal pengakuan pendapatan bulan Agustus 2018
Piutang dagang Rp 45.150.000
Retensi proyek Rp 2.150.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 43.000.000
PPN keluaran Rp 2.150.000

Tabel 4.19. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Enam Bulan Agustus 2018

Jurnal penerimaan tagihan termin 6 bulan Agustus 2018
Kas Rp 45.150.000
Piutang dagang Rp 45.150.000

Tabel 4.20. Tagihan Termin Tujuh Bulan September 2018

7. Pada saat tagihan termin tujuh bulan September 2018 Tagihan termin 7 (2% x Rp 860.000.000) Rp 17.200.000 Retensi 5% (Rp 860.000) Opname bersih Rp 16.340.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 1.720.000 Total tagihan Rp 18.060.000

Tabel 4.21. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan September 2018

Jurnal pengakuan pendapatan bulan September 2018 Piutang dagang Rp 18.060.000
Retensi proyek Rp 860.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 17.200.000
PPN keluaran

Rp 1.720.000

Tabel 4.22. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Tujuh September 2018

Jurnal penerimaan tagihan termin 7 bulan September 2018
Kas Rp 18.060.000
Piutang dagang Rp 18.060.000

Tabel 4.23. Tagihan Termin Delapan Bulan Desember 2018

8. Pada saat tagihan termin 8 bulan Desember 2018 Tagihan termin 8 (5% x Rp 860.000.000) Rp 43.000.000 Retensi 5% (Rp 2.150.000) Opname bersih Rp 40.850.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 4.300.000 Total tagihan Rp 45.150.000

Tabel 4.24. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan Desember 2018

Jurnal pengakuan pendapatan bulan Desember 2018
Piutang dagang Rp 45.150.000
Retensi proyek Rp 2.150.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 43.000.000
PPN keluaran Rp 2.150.000

Tabel 4.25. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Delapan Bulan Desember 2018

Jurnal penerimaan tagihan termin 8 bulan Desember 2018
Kas Rp 45.150.000
Piutang dagang Rp 45.150.000

Tabel 4.26. Tagihan Termin Sembilan Bulan Januari 2019

9. Pada saat tagihan termin sembilan bulan Januari 2019 Tagihan termin 9 (30% x Rp 860.000.000) Rp 258.000.000 Retensi 5% (Rp 12.900.000) Opname bersih Rp 245.100.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 25.800.000 Total tagihan Rp 270.900.000

Tabel 4.27. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan Januari 2019

Jurnal pengakuan pendapatan bulan Januari 2019
Piutang dagang Rp 270.900.000
Retensi proyek Rp 12.900.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 258.000.000
PPN keluaran Rp 25.800.000

Tabel 4.28. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Sembilan Bulan Januari 2019

Jurnal penerimaan tagihan termin 9 bulan Januari 2019
Kas Rp 270.900.000

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Piutang dagang Rp 270.900.000

Tabel 4.29. Tagihan Termin Sepuluh Bulan Februari 2019

10. Pada saat tagihan termin 10 bulan Februari 2019 Tagihan termin 10 (15% x Rp 860.000.000) Rp 129.000.000 Retensi 5% (Rp 6.450.000) Opname bersih Rp 122.550.000 PPN (10% x tagihan termin) Rp 12.900.000 Total tagihan Rp 135.450.000

Tabel 4.30. Jurnal Pengakuan Pendapatan Bulan Februari 2019

Jurnal pengakuan pendapatan bulan Februari 2019 Piutang dagang Rp 135.450.000
Retensi proyek Rp 6.450.000
Kemajuan faktur atas kontrak Rp 129.000.000
PPN keluaran Rp 12.900.000

Tabel 4.31. Jurnal Penerimaan Tagihan Termin Sepuluh Bulan Februari 2019

Jurnal penerimaan tagihan termin 10 bulan Februari 2019
Kas Rp 135.450.000
Piutang dagang Rp 135.450.000

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat kita bandingan pendapatan yang diperoleh antara pencatatan pendapatan yang digunakan oleh CV. Wahid Jaya Abadi dengan pencatatan sesuai dengan kaidah akuntansi PSAK No.34 dalam ilustrasi proyek yang sedang dijalankan sebagai berikut:

Table 4.32

Perbandingan Pendapatan Proyek antara Perusahaan dengan PSAK No. 34

Deskripsi	Menurut		Selisih
	Perusahaan	PSAK No.34	
Maret'18 Pendapatan	Rp 120.000.000	Rp 129.000.000	Rp 9.000.000
April'18 Pendapatan	Rp 54.000.000	Rp 43.000.000	Rp 11.000.000
Mei'18 Pendapatan	Rp 71.000.000	Rp 68.800.000	Rp 2.200.000
Juni'18 Pendapatan	Rp 50.000.000	Rp 86.000.000	Rp 36.000.000
Juli'18 Pendapatan	Rp 40.000.000	Rp 43.000.000	Rp 3.000.000
Agustus'18 Pendapatan	Rp 105.000.000	Rp 43.000.000	Rp 62.000.000
September'18 Pendapatan	0	Rp 17.200.000	Rp 17.200.000
Desember'18 Pendapatan	Rp 98.000.000	Rp 43.000.000	Rp 55.000.000
Januari'19 Pendapatan	Rp 135.000.000	Rp 258.000.000	Rp 123.000.000
Februari'19 Pendapatan			Rp

	Rp 157.000.000	Rp 129.000.000	28.000.000

Berdasarkan table 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan pendapatan yang cukup jauh antara pendapatan yang diperoleh CV Wahid Jaya Abadi dengan PSAK No. 34. Pendapatan yang diperoleh CV Wahid Jaya Abadi pada bulan Maret 2018 sebesar Rp 120.000.000 sedangkan pendapatan yang diperoleh berdasarkan perhitungan PSAK No.34 sebesar Rp 129.000.000, sehingga selisih antara pendapatan CV Wahid Jaya Abadi dengan PSAK No.34 sebesar Rp 9.000.000. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya seperti pada bulan Mei, pendapatan yang diperoleh CV. Wahid Jaya Abadi pada bulan tersebut sebesar Rp 71.000.000 sedangkan hasil perhitungan berdasarkan PSAK No.34 sebesar Rp 68.800.000 sehingga selisih pendapatan antara perusahaan dan PSAK No.34 pada nulan Mei sebesar Rp 2.200.000.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, CV. Wahid Jaya Abadi disarankan agar beralih menggunakan metode sesuai dengan kaidah akuntansi PSAK No.34 yaitu metode persentase dan *accrual basis*. Hal ini bertujuan agar pencatatan keuangan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar memperoleh data yang lebih lengkap dari pihak perusahaan yang akan diteliti supaya lebih mengetahui apakah metode yang dipakai perusahaan tersebut memenuhi syarat PSAK No. 34.

DAFTAR PUSTAKA

Darmayanti, E. F. (2012). Analisis Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Kontruksi. *ISSN*, 79-91.

Erlinadiansyah, T. Y. (2009). *Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Dengan Pendekatan Persentase Penyelesaian Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero)*. Surabaya: Airlangga Library.

Hayati, S., & Lili. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Berdasarkan PSAK 34 Tahun 2010. *Buletin Studi Ekonomi*, 1-9.

Indonesia, I. A. (2010). *Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Saleba Empat.

Jusup, A. H. (2005). *Dasaar-dasar Akuntansi jilid 1*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Kieso, D. E., Weygant, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Akuntansi Intermediate.* Jakarta: Erlangga.

Malakhatin, Z. (2010). *Pengakuan dan Pengukuran Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. Karya Pembangunan di Malang*. Malang: Unibraw Library.

Mulyadi. 2010. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Nariswari, E., M. Zaenuddin, dan F. Lubis. 2016. Perbandingan *Completed Contract Method* dan *Percentage of Completion Method* sebagai Alternatif Pilihan dalam Mengakui Pendapatan. *Applied Accounting and taxation*, 1(1): 25-31.

Perdana S. dan A. Rahman. 2019. Penerapan Manajemen Proyek Dengan Metode CPM (Critical Path Method) Pada Proyek Pembangunan SPBE. *Pengabdian Kepada Masyarakat*¸ 3(1): 242-250.

Pramurti, F. S. (2016). *Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa KontruksiPpada CV. INDARCHI ARCHITECT TEAM KLATEN*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ratunuman, S. M. (2013). Analisis Pengakuan Pendapatan Dengan Persentase Penyelesaian Dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar. *EMBA*, 576-584.

Riduwan. (2004). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Smith, J. M., & Skousen, K. F. (2006). *Akuntansi Keuangan Menenga*. Jakarta: Erlangga.

Septiono, A., Suhadak, dan N. Sujana. 2015. Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Petrosida Gresik). *Administrasi Bisnis*, 24(1): 1-10.

Sugiyono. (2007). *Metodelogi Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Suwardjono. (2006). *Teori Akuntansi Edisi Tiga.* Yogyakarta: BPEE ogyakarta.

Tiogi, A. H. (2018). *Analisis Pengakuan Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada CV. Wiyasa Jaya.* Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.

Tipukadang, F. K., D. P. E. Saerang, dan D. Afandi. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Kontrak Konstruksi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Sederhana Karya Jaya di Manado. *Berkala Ilmiah Efesiensi*, 16(4): 59-69.

Warren, C., Reeve, J. M., & Frees, P. E. (2006). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, A. A., & Nurhayati, N. (2017). Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis dan Acrual basis Pada Transaksi di Bank Syariah. *Al-anwal*, 27-38.